

**STRATEGI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
BERBASIS KOMODITI UNGGULAN DI KAWASAN AGROPOLITAN
KABUPATEN SOPPENG**

*STRATEGY ON THE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
BASED ON THE SUPERIOR COMMODITY IN AGROPOLITAN REGION
SOPPENG REGENCY*

AULIA SARASWATY



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

**STRATEGI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
BERBASIS KOMODITI UNGGULAN DI KAWASAN AGROPOLITAN
KABUPATEN SOPPENG**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan Pengembangan Wilayah

Disusun dan Diajukan Oleh

AULIA SARASWATY

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

TESIS
STRATEGI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
BERBASIS KOMODITI UNGGULAN DI KAWASAN AGROPOLITAN
KABUPATEN SOPPENG

Disusun dan diajukan oleh

AULIA SARASWATY
Nomor Pokok P0200211009

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 12 Juli 2013
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasehat,

Prof. Dr. Ir. Rahman Mappangaja, MS

Ketua

Ketua Program Studi Perencanaan
dan Pengembangan Wilayah

Dr. Ir. Roland A Barkey

Dr. Ir. Roland A Barkey

Anggota

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Ir. Mursalim

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AULIA SARASWATY

Nomor Mahasiswa : P0200211009

Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juli 2013

Yang Menyatakan

AULIA SARASWATY

PRAKATA



Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul "*Strategi Pengembangan Infrastruktur Berbasis Komoditi Unggulan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Soppeng*". Dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Rahman Mappangaja, MS, selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan dorongan inspirasi, bimbingan dan arahan, bekal pengalaman yang sangat berguna serta memberikan kelancaran, sehingga penulis merasa nyaman dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Dr. Ir. Roland A. Barkey, sebagai dosen anggota pembimbing, sekaligus Ketua/Penanggung Jawab Program Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah yang juga telah sangat memberikan bimbingan, arahan, dorongan inspirasi dan motivasi, dan petunjuk yang berguna bagi selesainya penulisan tesis ini.
3. Prof. Dr. Ir. Ananto Yudono; M.Eng, Prof. Dr. Ir. Shirly Wunas, DEA; Prof. Dr. Ir. Slamet Tri Sutomo, MS; Prof. Ir. Bambang Heryanto, M.Sc, Ph.D; Prof. Deddy T. Tikson, Ph.D; Prof. Dr. Ir. Hazairin Subair, M.Sc; Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, MS; Prof. Dr. Ir. I

Made Benyamin, M.Ec; Prof. Dr. Ir. Aris Baso, M.Sc; Prof. Dr. Ir. Muslim Salam, M.Ec, Ph.D; Dr. Ir. Suprpto, DEA; Dr. Ir. Ria Wikantari, M.Arch, dan para dosen pengajar lainnya yang telah dengan sabar, tekun dan menransformasikan ilmunya kepada penulis, sehingga memudahkan untuk menyelesaikan tugas-tugas pendidikan dan tugas pengembangan ilmu di kemudian hari.

4. Semua teman sejawat, khususnya teman-teman para mahasiswa Perencanaan dan Pengembangan Wilayah angkatan 2011 Universitas Hasanuddin: Nasyrh Azis, S.Pi; Didiet Haryadi Hakim, S.T; Dian Asri Unga Mega, S.Pt; Irwansyah, S.Pi; Erwin Amri, S.T; Muh. Arsyad, S.T; Andi Hamka, S.Pt; Yospin Seni Parerung, S.T, Rusneni, S.T; Mutmainnah, S.S; Zulkifli Pasomba, S.Pd; Rijal Fikri, S.T; Hamka Badaruddin, S; Muh. Ahadismal, S.Stp; Apriany Thahir, S. Stp; Sudy Suryana, S.T; Andi Achim, S.T, yang telah memberikan semangat belajar, kerjasama kekeluargaan, dan dorongan untuk maju bersama.
5. Kak R. Wiwin Atmaja, S.T dan Lutfi Hi Ardhani, S.P yang meskipun dari jurusan lain yang menemani sendau gurau penulis di tengah kesibukannya dalam menyelesaikan tugas-tugas studinya.
6. Segenap staf Program Pasca Sarjana, yang selalu sabar menunggu, melayani administrasi.

7. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng, Ketua Bappeda dan staf Pemerintah Kabupaten Soppeng terkait yang semuanya telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian sehingga penulisan tesis ini berjalan dengan lancar.
8. Akhirnya tesis ini penulis persembahkan kepada segenap keluarga dan handai tolan, terutama buat orang tuaku tercinta ibunda Hj. Herawaty Daramang, S.PdI dan ayahanda Muhiddin P yang yang penuh rasa kasih sayang yang telah membesarkan, mendidik dan selalu mendoakan penulis agar menjadi orang yang baik dan berguna serta telah mempersembahkan segala-segalanya buat ananda mulai dari proses perkuliahan hingga rampungnya tesis ini, hingga tiada untaian kalimat yang dapat mewakili rasa terima kasihku.
9. Demikian pula buat kakakku Ika Agusniaty, S.Pd yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna, karena berbagai kendala kesibukan, waktu dan kemampuan penulis, karenanya dengan ezadah hati dan lapang dada penulis sangat terbuka untuk menerima kritik, saran atau masukan yang bersifat membangun, guna perbaikan serta kesempurnaan tesis ini.

Makassar, Juli 2013

Aulia Saraswaty

ABSTRAK

AULIA SARASWATY. *Strategi Pengembangan Infrastruktur Berbasis Komoditi Unggulan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Soppeng* (dibimbing oleh **RAHMAN MAPPANGAJA** dan **ROLAND A. BARKEY**).

Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis status komoditi unggulan (padi dan jagung) di kawasan agropolitan Kabupaten Soppeng dan (2) merumuskan strategi pengembangan infrastruktur berbasis komoditi unggulan untuk mendukung percepatan pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Soppeng.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terhadap informan yang berkompeten dan mengakses data dari instansi terkait. Data diolah dan dianalisis dengan metode *Location Quotiont (LQ)* dan metode SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai LQ untuk komoditi unggulan, khususnya tanaman pangan berdasarkan luas areal panen tahun 2007 sampai 2011 bervariasi. Dengan hasil perhitungan tersebut, komoditi padi dan jagung bernilai $LQ > 1$. Range nilai LQ untuk komoditi padi pada kawasan agropolitan lima tahun terakhir (2007-2011) yaitu rata-rata 1,00. Begitu pula halnya dengan komoditi jagung, range nilai LQ lima tahun terakhir berkisar antara 1,21-1,62. Pemilihan alternatif strategi yang diprioritaskan untuk pengembangan infrastruktur kawasan agropolitan adalah meningkatkan infrastruktur penunjang berbasis komoditi unggulan misalnya peningkatan implementasi sarana pertanian, pengolahan dan jasa penunjang seperti renovasi badan pengelola sub terminal agribisnis (STA), peningkatan implementasi pasar hasil pertanian untuk memanfaatkan peluang ekspor.

Kata kunci: Komoditi unggulan, *Location Quotiont (LQ)*, Strategi pengembangan infrastruktur

ABSTRACT

AULIA SARASWATY. *Strategy on the Infrastructure Development Based on the Superior Commodity in Agropolitan Region Soppeng Regency* (supervised by **RAHMAN MAPPANGAJA** dan **ROLAND A. BARKEY**).

The research aimed (1) to analyze status the superior commodity (paddy and maize) in the agropolitan region Soppeng regency (2) to formulate strategy on the infrastructure development based on the superior commodity for supporting the agropolitan region development acceleration at soppeng regency.

The research used a descriptive method. Data collection was carried out by the interview technique on the competent informants and accessed the data from the related instances. The data collected were processed and analysed using the *Location Quotiont (LQ)* method dan SWOT method.

The research result indicates that the commodity LQ values particularly food plants based on the harvest areal sizes in 2007 to 2011 vary. Perceiving the analysis result of the above LQ calculation, paddy and maize commodity has the value of $LQ > 1$. The LQ values for the paddy commodity in the agropolitan region in five years (2007-2011) range 1,00. So does the maize commodity, the LQ values in the five years (2007-2011) range from 1,21 to 1,62. The priority strategy alternative selection for the agropolitan regional infrastructure development is to improve the superior commodities based the supporting infrastructures, for example: the agricultural facility implementation improvement, the processing and supporting services such as: the renovation of the management board of sub terminal agribusiness (STA), the agricultural product marketing implementation improvement to utilize the export opportunity.

Key-words: Superior commodity, *Location Quotiont (LQ)*, Infrastructure development strategy.

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Pengembangan Wilayah	7
B. Konsep Pengembangan Agropolitan	8
C. Indikator Pengembangan Kawasan Agropolitan	18
D. Kebijakan Pengembangan Agropolitan di Kabupaten Soppeng	25
E. Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah	27
F. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur (transporasi) Kabupaten Soppeng	30
G. Konsep Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	35

H. Potensi Pertanian dalam Pengembangan Wilayah	37
I. Kerangka Konseptual	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
C. Objek Penelitian dan Narasumber	46
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data	54
G. Batasan Penelitian	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Keadaan Umum Kabupaten Soppeng	66
B. Daerah Kawasan Agropolitan Kabupaten Soppeng	72
C. Analisis Komoditi Status Komoditi Unggulan (padi dan Jagung) di Kawasan Agropolitan Kabupaten Soppeng	97
D. Ketersediaan Infrastruktur Berbasis Komoditi Unggulan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Soppeng	101
E. Strategi Pengembangan Infrastruktur Berbasis Komoditi Unggulan Untuk Mendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Soppeng	116
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	136
B. Saran	137

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1	Matriks hubungan antara tujuan, data, metode dan keluaran pada setiap tahapan penelitian	52
2	Matriks SWOT Untuk Menentukan Strategi Kebijakan	60
3	Jumlah Penduduk di Kabupaten Soppeng Menurut Kecamatan Tahun 2011	68
4	Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Soppeng Tahun 2011	70
5	Variabel dan Indikator Penilaian Setiap Kecamatan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Soppeng	74
6	Variabel dan Indikator Penilaian Lokasi Daerah Pusat Pertumbuhan Kawasan Agropolitan Kabupaten Soppeng	76
7	Luas dan Persentase Wilayah Kawasan Agropolitan di Kabupaten Soppeng	78
8	Jumlah Penduduk di Kawasan Agropolitan Kabupaten Soppeng Tahun 2011	80
9	Pertumbuhan Penduduk di Kawasan Agropolitan Kabupaten Soppeng Tahun 2010-2011	81
10	Jumlah Pendapatan Perbulan Penduduk di Kawasan Agropolitan Kabupaten Soppeng Tahun 2011	82
11	Jenis Tempat Hunian Penduduk di Kawasan Agropolitan	83
12	Mata Pencaharian Penduduk Kawasan Agropolitan Kabupaten Soppeng	84
13	Luas Persawahan Menurut Jenis Pengairan	85
14	Ketersediaan Sarana Umum (utilitas) di Desa/Kelurahan Kawasan Agropolitan tahun 2011	86

15	Ketersediaan Prasarana dan Sarana (<i>existing</i>) di Kawasan Agropolitan Kabupaten Soppeng tahun 2011	87
16	Jumlah Koptan, KUD, Saprotan dan BRI Unit Desa Kawasan Agropolitan di Kabupaten Soppeng tahun 2011	89
17	Potensi Unggulan Agropolitan Kecamatan (Kawasan Agropolitan)	90
18	Lokasi Kawasan Agropolitan Berdasarkan Kesesuaian Komoditas Unggulan	91
19	Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Kabupaten Soppeng tahun 2002-2011	92
20	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2009-2011	93
21	Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung di Kabupaten Soppeng Tahun 2002-2011	95
22	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2009-2011	96
23	<i>Location Question (LQ)</i> Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Areal Panen Terhadap sub sektor Tanaman Pangan Tahun 2007-2011	98
24	Sarana/prasarana Yang Dibutuhkan Untuk Kawasan Untuk Pengembangan Komoditas Unggulan	115
25	Faktor Strategis Internal dan Eksternal	128
26	Ringkasan Faktor Strategi Internal	130
27	Ringkasan Faktor Strategi Eksternal	131
28	Analisis Keterkaitan Faktor-Fakor Internal dan Faktor Eksternal (Matriks SWOT)	133

29	Luas areal panen (Ha) Tanaman Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Soppeng Tahun 2007-2011	147
30	Luas Areal Panen Tanaman Pangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Soppeng Tahun 2007-2011	148
31	Luas Areal Panen Kabupaten Soppeng Tahun 2007-2011	149
32	Perhitungan Location Quetions (L/Q) tahun 2007	149
33	Perhitungan Location Quetions (L/Q) tahun 2008	150
34	Perhitungan Location Quetions (L/Q) tahun 2009	150
35	Perhitungan Location Quetions (L/Q) tahun 2010	151
36	Perhitungan Location Quetions (L/Q) tahun 2011	151

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1	Kota Pertanian (<i>Agropolis</i>)	13
2	Pokok Permasalahan Agropolitan	14
3	Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan	15
4	Kerangka Konseptual	42
5	Peta administrasi Kabupaten Soppeng	44
6	Peta lokasi penelitian	45
7	Bagan alir strategi pengembangan infrastruktur kawasan agropolitan	53
8	Posisi Organisasi dan Strategi Yang Dapat Dipilih	61
9	Jenis Permasalahan Produksi	103
10	Jenis Permasalahan Pengolahan	105
11	Jenis Permasalahan Distribusi	106
12	Jenis Permasalahan Pemasaran	107
13	Jenis Permasalahan Permodalan	108
14	Jenis Permasalahan Penyuluhan	109
13	Posisi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Soppeng	132

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Halaman
1	Pedoman Wawancara	141
2	Luas Areal Panen (Ha) Tanaman Pangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Soppeng dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007-2011	147
3	Perhitungan Location Of Quotient (L/Q) Komoditi Unggulan Tanaman Pangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Soppeng Berdasarkan Luas areal Tahun 2007-2011	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai ketentuan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan memutuskan bahwa, selama periode 2009-2029, pemerintah bertujuan untuk mewujudkan peran Sulawesi Selatan sebagai kawasan bahan pangan berkelanjutan khususnya beras dan jagung dengan pusat pengembangannya di sentra produksi seperti wilayah Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu Utara, Luwu Timur (Bosowasipilu), Pangkep, Maros, Gowa dan Takalar.

Kabupaten Soppeng memiliki potensi lahan pertanian yang cukup memadai, sehingga pembangunan yang dilaksanakan bertumpu pada sektor pertanian. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Soppeng tahun 2010-2030 yaitu terwujudnya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan berbasiskan agropolitan dan pariwisata dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.

Pemerintah pusat yang dicanangkan oleh Menteri Pertanian dan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah pada tahun 2002, yang merupakan program multisektoral dari masing-masing departemen dan instansi terkait telah memprogramkan Gerakan Pengembangan Kawasan

Agropolitan sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan yang berbasis pertanian. Berdasarkan SK. Bupati No. 691/VIII/2003 tanggal 5 Agustus 2003, telah ditetapkan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Soppeng, meliputi empat wilayah yaitu Kecamatan Marioriwawo, Liliraja, Lilirilau dan Lalabata.

Kabupaten Soppeng dengan potensi pertanian yang cukup luas yang didominasi oleh tanaman pangan diantaranya komoditi yang memiliki produksi yang cukup menguntungkan yaitu padi, dan jagung. Hal ini diperkuat oleh laporan akhir *master plan* bahwa potensi komoditi unggulan agropolitan di Kabupaten Soppeng yaitu padi dan jagung. Produksi komoditi unggulan di kawasan agropolitan pada tahun 2011 yaitu produksi padi sebanyak 135.215 ton dengan luas areal tanam yaitu 21,522 Ha dan produksi jagung sebanyak 29.763 ton dengan luas tanam 6,743 Ha (BPS Soppeng, 2012).

Komoditi tersebut secara teknis layak dikembangkan, dari sisi ekonomi menguntungkan dan secara sosial dapat diterima oleh masyarakat setempat. Namun komoditas ini akan mendapatkan nilai tambah bagi masyarakatnya jika dikelola dengan baik. Sektor *on farm* (budidaya) dan *off farm* sangatlah penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Ada beberapa faktor penghambat yang menyebabkan pengembangan kawasan agropolitan terhenti pada tahun 2007 di antaranya dari aspek produksi, aspek pengolahan hasil dan pasca panen, pembinaan sumber daya manusia (SDM), aspek pendanaan dan aspek

pemasaran. Hal ini disebabkan oleh tata niaga komoditas ini masih bersifat tradisional, kurangnya sentuhan infrastruktur teknologi baik *on farm* maupun *off farm* menyebabkan posisi tawar petani menjadi lemah. Seluruh aspek tersebut salah satunya terkait dengan masalah prasarana dan sarana dalam menunjang pengembangan kawasan agropolitan.

Dengan pertimbangan tersebutlah, maka pada tahun 2012, pemerintah berencana untuk melanjutkan program agropolitan di Kabupaten Soppeng. Maka diperlukan harmonisasi dan fungsionalisasi ditinjau dari kebutuhan infrastruktur wilayah. Implikasi positif dan regulasi ini akan membawa sejumlah peningkatan aktivitas terhadap pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Soppeng yang membutuhkan infrastruktur dalam proses pengembangannya, sehingga diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pengembangan agropolitan secara adil dan berkelanjutan.

Dengan penyediaan infrastruktur diharapkan akan dapat berfungsi sebagai *primer mover* (penggerak utama) pengembangan kawasan agropolitan, sehingga seluruh substansi yang terkait dengan pengembangan kawasan agropolitan dapat berjalan simultan dan harmonis. Secara simulotan artinya subsistem agribisnis hulu, subsistem usaha tani, subsistem agribisnis hilir dan sub sistem jasa penunjang harus dapat dikembangkan sekaligus.

Pembangunan infastruktur dapat mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan

ekonomi. Penyediaan infrastruktur yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi.

Agar pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Soppeng dapat mengakomodir dan meningkatkan kebutuhan nyata masyarakat, serta mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi secara lebih besar, maka diperlukan suatu strategi yang dapat digunakan sebagai bahan dasar/pertimbangan bagi para pengambil keputusan.

Pengembangan prasarana wilayah dalam prospek pengembangan sumber daya alam harus berbasis karakteristik dan kekhasan wilayah tersebut. Pembangunan prasarana wilayah yang berbasis potensi (komoditi) unggulan menjadi tolak ukur dalam pengembangan prasarana agar dalam dapat termanfaatkan secara maksimal prasarana tersebut.

Potensi sumberdaya lahan dan sumberdaya ekonomi kawasan hanya dapat dikembangkan lebih lanjut bila didukung oleh sarana dan prasarana (infrastruktur) yang memadai. Infrastruktur yang harus dikembangkan meliputi infrastruktur pendukung produksi (seperti irigasi, pupuk, pestisida, alat pengolahan lahan dan benih), infrastruktur pengolahan hasil/agroindustri (seperti energi, air, pabrik) dan infrastruktur pemasaran (seperti koperasi, perbankan, pergudangan). Tentu saja pengembangan komoditi unggulan kawasan strategis ekonomi ditentukan pula oleh pasar, baik di tingkat lokal, regional, terlebih lagi di tingkat internasional. Tentu saja dukungan infrastruktur yang diperlukan

sebagaimana dijelaskan di atas dapat merupakan tugas kabupaten untuk membangunnya, dapat pula merupakan tugas provinsi, maupun tugas pemerintah (pusat).

Berdasarkan hal tersebut dan mengacu pada uraian di atas, maka diperlukan studi mengenai strategi pengembangan infrastruktur kawasan agropolitan untuk mendukung peningkatan nilai produksi komoditi unggulan di Kabupaten Soppeng.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah, sebagai berikut:

1. Apakah status komoditi unggulan (padi dan jagung) di kawasan agropolitan Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimana strategi pengembangan infrastruktur berbasis komoditi unggulan untuk mendukung percepatan pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Soppeng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis status komoditi unggulan (padi dan jagung) yang di kawasan agropolitan Kabupaten Soppeng.

2. Merumuskan strategi pengembangan infrastruktur berbasis komoditi unggulan untuk mendukung percepatan pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Soppeng.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Sebagai masukan yang berguna untuk penyusunan rencana induk infrastruktur yang bersifat makro di Kabupaten Soppeng, dalam mencapai kemakmuran masyarakat secara utuh.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif bagi pembangunan daerah, khususnya pengembangan kawasan agropolitan.
3. Bagi masyarakat dan *stakeholder* lainnya dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi bagi pengembangan usaha agribisnis di Kabupaten Soppeng.
4. Sebagai bahan informasi dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengembangan Wilayah

Wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografi yang membutuhkan organisasi dan penataan ruang dan waktu dalam pemanfaatan segala kekayaannya, selain dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal (Budiharsono, 2001).

Pengembangan wilayah memandang pentingnya keterpaduan sektoral, spasial serta keterpaduan antar pelaku pembangunan di dalam dan antar wilayah. Keterpaduan sektoral menuntut adanya keterkaitan fungsional yang sinergis antar sektor pembangunan, sehingga setiap kegiatan pembangunan dalam kelembagaan sektoral dilaksanakan dalam kerangka pembangunan wilayah. Dalam pandangan sistem industri, keterpaduan sektoral berarti keterpaduan sistem input dan output industri yang efisien dan sinergis. Oleh karena itu, wilayah yang berkembang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan antar sektor ekonomi wilayah, dalam arti terjadi transfer input dan output barang dan jasa antar sektor yang sangat dinamis (Rustiadi, *et al.* 2011).

Kebijakan pembangunan yang direncanakan secara jelas dan terperinci dengan dasar peran aktif masyarakat serta dukungan dari pihak

aparatus pelaksana yang baik merupakan suatu awal dari keberhasilan perencanaan pembangunan yang akan dicapai.

Kebijakan dan strategi yang diterapkan haruslah bersifat menyeluruh dan terpadu antara sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan perairan. Selain itu, pemanfaatan perairan adalah sebagai sarana dan media peragangan antar wilayah maupun antar negara bagi kepentingan bangsa dan negara serta mewujudkan pertahanan dan keamanan di wilayah perairan di Indonesia (Sumdiningrat, 1999).

B. Konsep Pengembangan Agropolitan

Konsep pengembangan agropolitan sebagai siasat untuk pengembangan perdesaan. Meskipun termasuk banyak hal dalam pengembangan agropolitan, seperti redistribusi tanah, namun konsep ini pada dasarnya memberikan pelayanan perkotaan di kawasan perdesaan atau dengan istilah lain yang digunakan oleh Friedmann adalah "kota di ladang".

Dengan demikian petani atau masyarakat desa tidak perlu harus pergi ke kota untuk mendapatkan pelayanan, baik dalam pelayanan yang berhubungan dengan masalah produksi dan pemasaran maupun masalah yang berhubungan dengan kebutuhan sosial budaya dan kehidupan setiap hari. Pusat pelayanan diberikan pada setingkat desa, sehingga sangat dekat dengan pemukiman petani, baik pelayanan mengenai teknik

berbudidaya pertanian maupun kredit modal kerja dan informasi pasar.

Pembangunan pertanian menurut Mosher (1976) adalah sebuah kecenderungan teknologi, organisasi, aktivitas dan nilai budaya yang peningkatannya dapat membawa hasil lahan pertanian menjadi lebih efektif dengan peningkatan produksi pertanian per petani. Selanjutnya Mosher mencirikan pertanian modern sebagai berikut: 1) teknologi dan efisiensi usaha taninya terus menerus diperbaiki, 2) hasil bumi yang diproduksi terus menerus berubah dengan adanya perubahan permintaan konsumen dan perubahan biaya produksi yang disebabkan oleh adanya perubahan teknologi dan 3) perbandingan antara penggunaan tanah, tenaga kerja dan modal pada usaha tani terus berubah sesuai dengan perubahan penduduk, alternatif kesempatan kerja dan perubahan teknologi usaha tani. Pertanian modern adalah pertanian yang sangat dinamis dan fleksibel serta terus meningkat produktivitasnya.

Faktor-faktor yang mendukung terciptanya pertanian modern menurut Mosher (1991) adalah: 1) pendidikan pembangunan, 2) kredit produksi, 3) kerjasama berkelompok oleh para petani, 4) perbaikan dan perluasan tanah pertanian, 5) perencanaan nasional untuk pembangunan pertanian. Selanjutnya Mosher (1991) menambahkan syarat dasar untuk mencapai pertanian modern adalah: 1) penelitian untuk mengembangkan teknologi pertanian yang baru, 2) mengatur pebuatan atau impor sarana produksi dan alat pertanian, 3) mengusahakan adanya insentif produksi bagi petani, 4) mengadakan perbaikan tanah pertanian, dan 5)

mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga teknis. Komponen-komponen fungsional pertanian modern meliputi (Mosher, 1991): 1) farming, 2) agri-support yang terbagi menjadi komersial dan non komersial, dan 3) agri-milieu yang terdiri dari politik, ekonomi, dan budaya. Untuk mendukung pertanian modern, kegiatan *agri-support*, harus mudah diakses oleh petani yang memiliki pertanian potensial. Untuk itu perencanaan pertanian dilakukan dalam satuan *farming district* yang melayani *farming locality*.

Secara konseptual pengembangan agropolitan merupakan sebuah pendekatan pengembangan suatu kawasan pertanian perdesaan yang mampu memberikan berbagai pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan produksi pertanian di sekitarnya baik yang berhubungan dengan sarana produksi, jasa distribusi, maupun pelayanan sosial ekonomi lainnya sehingga masyarakat setempat tidak harus menuju ke kota untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.

Dengan kata lain, pengembangan agropolitan merupakan suatu upaya memperpendek jarak antara masyarakat di kawasan sentra pertanian dengan pusat-pusat pelayanan konvensional (yang berkembang tanpa orientasi kuat pada pengembangan kegiatan pertanian. Dengan demikian pusat-pusat pelayanan baru ini (agropolitan) adalah pusat pelayanan dengan cakupan pelayanan terbatas dan lebih berorientasi pada pelayanan kebutuhan masyarakat pertanian (Rustiadi, *et.al*, 2011).

Besarnya biaya produksi dan biaya pemasaran dapat diperkecil dengan meningkatkan faktor-faktor kemudahan pada kegiatan produksi dan pemasaran. Faktor-faktor tersebut menjadi optimal dengan adanya kegiatan pusat agropolitan. Jadi peran agropolitan adalah untuk melayani kawasan produksi pertanian di sekitarnya dimana berlangsung kegiatan agribisnis oleh para petani setempat. Fasilitas pelayanan yang diperlukan untuk memberikan kemudahan produksi dan pemasaran antara lain berupa input sarana produksi (pupuk, bibit, obat-obatan, peralatan, dan lain-lain), sarana penunjang produksi (lembaga perbankan, koperasi, listrik, dan lain-lain), serta sarana pemasaran (pasar, terminal angkutan, sarana transportasi, dan lain-lain).

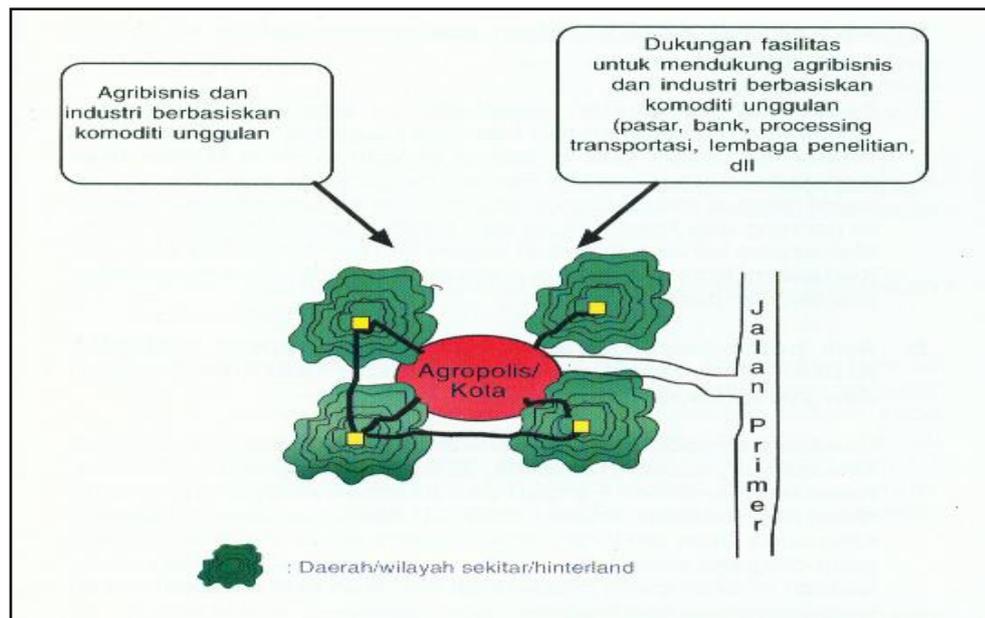
Pusat pelayanan diberikan baik dalam bentuk pelayanan teknik budidaya pertanian, kredit modal kerja dan informasi pasar sehingga dapat menekan biaya produksi dan biaya pemasaran. Konsep ini berupaya dalam pembentukan masyarakat pedesaan yang mandiri dengan kemampuan mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Fasilitas pelayanan difokuskan dalam memberikan kemudahan produksi dan pemasaran antara lain berupa input sarana produksi (pupuk, bibit, obat-obatan dan peralatan), sarana penunjang produksi (lembaga perbankan, koperasi, listrik) dan sarana pemasaran (pasar, terminal angkutan, dan sarana transportasi).

Pendekatan agropolitan menggambarkan bahwa pembangunan pedesaan secara beriringan dapat dilakukan dengan pembangunan

wilayah perkotaan pada tingkat lokal. Dalam konteks pengembangan agropolitan terdapat tiga isu utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu: (1) akses terhadap lahan pertanian dan penyediaan pengairan; (2) desentralisasi politik dan wewenang administrasi dari tingkat pusat dan tingkat lokal; (3) perubahan paradigma/kebijakan pembangunan nasional untuk lebih mendukung diversifikasi produk pertanian. Melihat kota-kota sebagai site utama untuk fungsi-fungsi politik dan administrasi, pendekatan pengembangan agropolitan di banyak negara lebih cocok dilakukan di skala kabupaten (Douglass, 1998).

Kawasan Agropolitan adalah kawasan terpilih dari kawasan agribisnis atau sentra produksi pertanian terpilih di mana pada kawasan tersebut terdapat kota pertanian (*agropolis*) yang merupakan pusat pelayanan agribisnis yang melayani, mendorong, dan memacu pembangunan pertanian kawasan dan wilayah-wilayah sekitarnya.

Pada kawasan agribisnis atau sentra produksi pertanian sebaiknya ditetapkan satu atau dua komoditi untuk dikembangkan secara intensif dan terarah. Pada akhir program diharapkan di kawasan tersebut tumbuh dan berkembang industri berbasis komoditi unggulan yang menghasilkan produk yang memiliki daya saing, serta dapat mensejahterahkan masyarakat kawasan untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya gerakan pengembangan (Badan Pengembangan SDM Pertanian Departemen Pertanian, 2003).



Gambar 1. Kota pertanian (*agropolis*)

Dalam UU No 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, kawasan agropolitan didefinisikan sebagai kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Sedangkan dalam materi presentasi Mendagri di Kabupaten Magelang tahun 2007 tersirat bahwa Dalam UU No 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, kawasan agropolitan didefinisikan sebagai kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. terkait dengan empat isu yang menjadi prioritas nasional, sebagaimana pada Gambar 2 berikut ini:

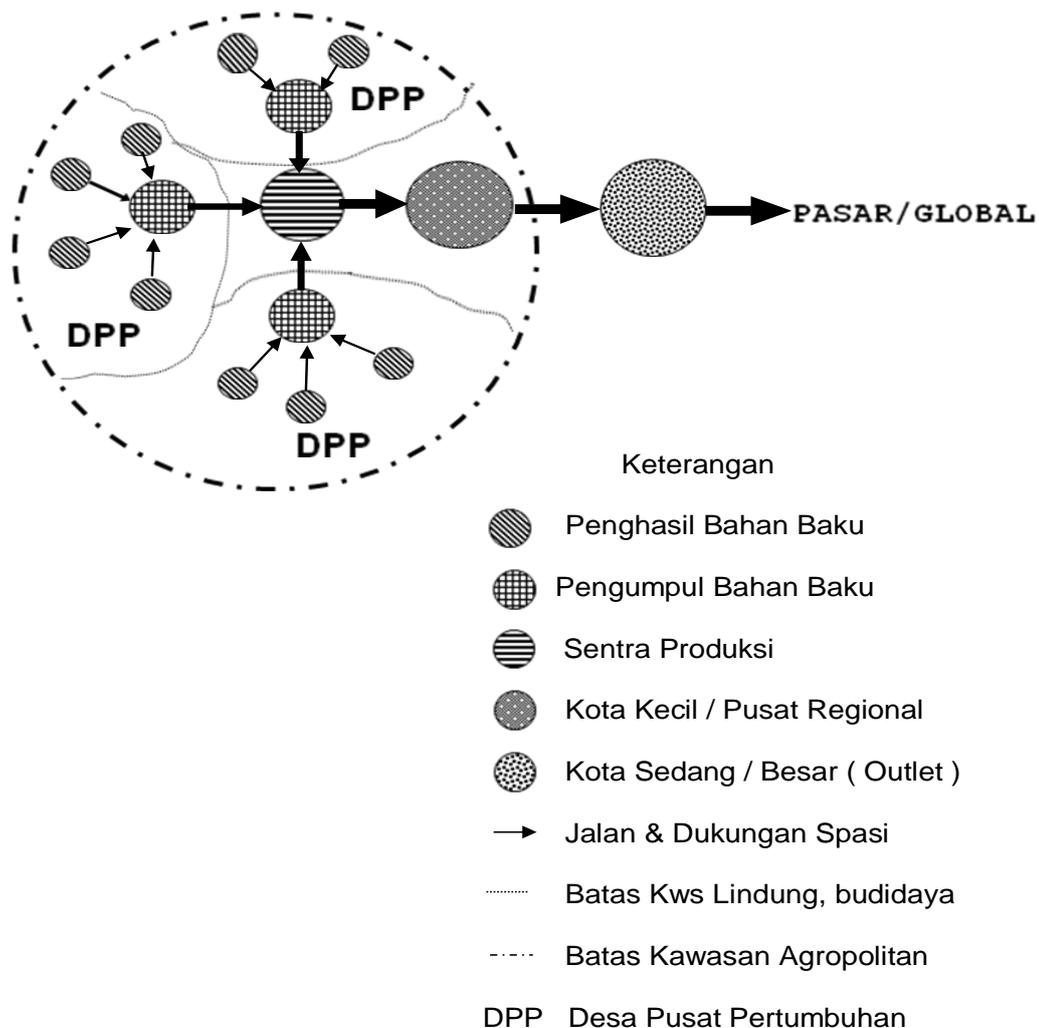


Gambar 2. Pokok permasalahan agropolitan

Berdasarkan issue dan permasalahan pembangunan perdesaan yang terjadi, pengembangan kawasan agropolitan merupakan alternatif solusi untuk pengembangan wilayah perdesaan. Kawasan agropolitan disini diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukan dari adanya hierarki keruangan desa, yakni dengan adanya pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya membentuk kawasan agropolitan. Di samping itu kawasan agropolitan dicirikan dengan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis dan pusat agribisnis yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya (lihat Gambar 3).

Dalam pengembangannya, kawasan tersebut tidak bisa terlepas dari pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan nasional (RTRWN) dan sistem pusat kegiatan pada tingkat provinsi (RTRW Provinsi) dan kabupaten (RTRW Kabupaten). Hal ini disebabkan, rencana tata ruang wilayah merupakan kesepakatan bersama tentang pengaturan ruang wilayah. Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(RTRWN), maka pengembangan kawasan agropolitan harus mendukung pengembangan kawasan andalan. Dengan demikian tujuan pembangunan nasional dapat diwujudkan (Djakapermana, 2003).



Gambar 3. Konsep pengembangan kawasan agropolitan

Menurut Soenaryo (2007) bahwa pengembangan agropolitan didasari pada sistem hubungan desa-kota, di mana desa berperan sebagai sentra produksi pertanian dan kota berperan sebagai pusat pelayanan, pemodalan, dan pemasaran. Dalam konsep agropolitan,

melalui dukungan SDM, teknologi, saprodi, kesesuaian lahan, dan sistem infrastruktur diharapkan peran desa dan kota dapat berjalan secara proporsional, sinergis, dan saling memperkuat. Suatu kawasan agropolitan yang sudah berkembang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut memperoleh pendapatan dari kegiatan pertanian (agribisnis)
- b. Sebagian besar kegiatan di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan pertanian atau agribisnis, termasuk industri (pengolahan) pertanian yang sudah berkembang, perdagangan hasil-hasil pertanian termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor, perdagangan agribisnis hulu (sarana pertanian, permodalan) industri kecil, dan agrowisata serta jasa pelayanan.
- c. Hubungan antara kota dan kawasan agropolitan bersifat interdependensi/ timbal balik yang harmonis, dan saling membutuhkan, dimana kawasan agropolitan mengembangkan usaha budidaya (*on farm*) dan produk olahan skala rumah tangga (*off farm*), sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaya dan agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian, modal, teknologi, informasi pengolahan hasil dan penampungan (pemasaran) hasil produksi/produk pertanian.
- d. Kehidupan masyarakat di kawasan agropolitan mirip dengan suasana kota karena keadaan sarana yang ada di agropolitan tidak jauh berbeda dengan di kota.

Kawasan pertanian tersebut memiliki fasilitas seperti layaknya perkotaan. Disini nantinya diharapkan akan terbentang panorama kota yang asri, sejuk dan damai. Namun dengan fasilitas yang tidak kalah dengan sebuah kota modern, dimana berbagai sarana jaringan jalan, lembaga keuangan, pasar, perkantoran, lembaga penyuluhan, alih teknologi dan lembaga pendidikan serta penelitian. Selain itu juga tersedia sarana air bersih, kantor kelembagaan milik petani. Menurut Rustiadi *et, al* (2011) pembangunan agropolitan dengan permasalahan dan tantangan kewilayahan dan pembangunan pedesaan pada dasarnya ditujukan untuk: (1) mendorong ke arah terjadinya desentralisasi pembangunan maupun kewenangan; (2) menanggulangi hubungan saling memperl lemah antara perdesaan dengan perkotaan; (3) menekankan kepada pengembangan ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal dan bagaimana melibatkan sebesar mungkin peran masyarakat perdesaan dalam pembangunan wilayah perdesaan.

Sedangkan dalam pengembangannya kawasan agropolitan yang berkembang dicirikan sebagai berikut: (1) peran sektor pertanian sampai ke tingkat *agroprocessing*-nya tetap dominan; (2) pengaturan pemukiman yang tidak memusat, tetapi tersebar pada skala minimal sehingga dapat dilayani oleh pelayanan infrastruktur seperti listrik, air minum, ataupun telekomunikasi. Infrastruktur yang tersedia tersebut dapat melayani keperluan masyarakat untuk mengembangkan usaha taninya sampai ke aktivitas pengolahan hasil; (3) aksesibilitas yang baik dengan pengaturan

pembangunan jalan sesuai dengan kelas jalan yang dibutuhkan seperti jalan usaha tani sampai ke jalan kolektor dan jalan arteri primer; (4) memiliki sistem penataan ruang yang efektif serta konsistensi para pengelola kawasan dalam menahan setiap kemungkinan konversi dan perubahan fungsi lahan yang menyimpang dari peruntukannya.

C. Indikator Pengembangan Kawasan Agropolitan

Menurut Rustiadi *et al.* (2011) bahwa suatu kawasan agropolitan harus memiliki ciri-ciri yaitu sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan tersebut di dominasi oleh kegiatan pertanian atau agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan terintegrasi mulai dari:

1. Pusat Agropolitan yang mencakup:
 - a. Pusat perdagangan dan transportasi *pertanian (agricultural trade/transport center)*.
 - b. Penyedia jasa pendukung pertanian *(agricultural support services)*.
 - c. Pasar konsumen produk non-pertanian *(non agricultural consumers market)*.
 - d. Pusat industri pertanian *(agro-based industry)*.
 - e. Penyedia pekerjaan non pertanian *(non agricultural employment)*.
 - f. Pusat agropolitan dan hinterlandnya terkait dengan sistem permukiman nasional, provinsi, dan kabupaten (RTRW Provinsi/Kabupaten).

2. Unit-unit kawasan pengembangan (hinterland) yang mencakup:
 - a. Pusat produksi pertanian (*agricultural production*).
 - b. Intensifikasi pertanian (*agricultural intensification*).
 - c. Pusat perdagangan perdesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian (*rural income and demand for non agricultural goods and services*).
 - d. Produksi tanaman siap jual dan diversifikasi (*cash crop production and agricultural diversification*).
3. Terdapat sektor unggulan yang merupakan:
 - a. Sektor unggulan yang sudah berkembang dan didukung oleh sektor hilirnya.
 - b. Kegiatan agribisnis yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat yang paling besar (sesuai dengan kearifan lokal).
 - c. Mempunyai skala ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan orientasi ekspor.
4. Memiliki sistem kelembagaan yang mendukung berkembangnya kawasan agropolitan seperti adanya organisasi petani, organisasi produsen agribisnis, dll.
5. Memiliki prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis seperti jalan, sarana irigasi, air bersih, pasar, terminal, jaringan telekomunikasi, listrik, pusat informasi, pengembangan agribisnis, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.

Melalui keterkaitan tersebut, pusat agropolitan dan kawasan produksi pertanian berinteraksi satu sama lain secara menguntungkan. Dengan adanya pola interaksi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*) produksi kawasan agropolitan sehingga pembangunan pedesaan dapat dipacu dan migrasi desa-kota yang terjadi dapat dikendalikan.

Berdasarkan buku pedoman pengelolaan ruang kawasan agropolitan, kawasan agropolitan yang akan dikembangkan harus dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki sumber daya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian khususnya pangan, yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai paasar (selanjutnya disebut komoditi unggulan).
2. Memiliki prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis khususnya pangan seperti misalnya: jalan, sarana irigasi/pengairan, sumber air baku, pasar, terminal, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan agribisnis, sarana produksi dan pengolahan hasil pertanian, dan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.
3. Memiliki sumber daya manusia yang mau berpotensi untuk mengembangkan kawasan agropolitan secara mandiri.
4. Konservasi lahan dan kelestarian lingkungan hidup bagi kelestarian sumber daya alam, kelestarian sosial budaya maupun ekosistem

secara keseluruhan.

Rustiadi *et al.* (2011) menjelaskan bahwa suatu kawasan agropolitan ditetapkan oleh kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki komoditas dan produk olahan pertanian unggulan. Komoditas dan produk olahan pertanian unggulan menjadi salah satu persyaratan penting bila akan mengembangkan kawasan agropolitan. Komoditas pertanian unggulan yang dimaksud seperti tanaman pangan (padi, jagung), hortikultura (sayur-mayur, bunga, buah-buahan), perkebunan (kakao, sawit, kopi), perikanan (udang, berbagai jenis ikan) dan peternakan (sapi, babi).
2. Memiliki daya dukung dan potensi fidik yang baik. Daya dukung lahan untuk pengembangan agropolitan harus sesuai syarat dengan jenis komoditas unggulan yang akan dikembangkan meliputi antara lain kemiringan lahan, ketinggian, kesuburan lahan, dan kesesuaian lahan.
3. Luas kawasan dan jumlah penduduk yang memadai. Untuk memperoleh hasil produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pasar secara berkelanjutan perlu luas lahan yang memadai dalam mencapai skala ekonomi (*economic of scale*) dan cakupan ekonomi (*economic of scope*).
4. Tersedianya dukungan prasarana dan sarana. Tersedianya prasarana dan sarana pemukiman dan produksi yang memadai untuk mendukung kelancaran usaha tani dan pemasaran hasil

produksi. Sarana dan prasarana tersebut antara lain adalah jalan poros desa, pasar, irigasi, terminal, listrik dan lain sebagainya.

Lain halnya menurut Sulistiono (2008), suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi suatu kawasan agropolitan bila dapat memenuhi persyaratan berikut:

1. Memiliki potensi sumber daya lahan yang cukup luas dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai pasar.
2. Memiliki berbagai kelembagaan dan prasarana/sarana wilayah untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis yaitu:
 - a) Pasar, baik pasar untuk hasil hasil pertanian, pasar sarana produksi pertanian, alat dan mesin pertanian, maupun pasar jasa pelayanan termasuk sistem lelang serta gudang tempat penyimpanan dan processing hasil pertanian sebelum dipasarkan.
 - b) Lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan) sebagai sumber modal untuk kegiatan agribisnis
 - c) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai sumber informasi agribisnis dan penyalur-alihan teknologi pertanian untuk mengembangkan produksi yang lebih efisien dan menguntungkan, pusat penyuluhan sistem dan usaha agribisnis.

- d) Percobaan/pengkajian teknologi pertanian, untuk mengembangkan teknologi tepat guna yang cocok untuk daerah kawasan agropolitan.
 - e) Jaringan jalan yang memadai dan aksesibilitas dengan daerah lainnya serta sarana irigasi, yang kesemuanya untuk mendukung usaha /pertanian (agribisnis) yang efisien.
 - f) Memiliki kelembagaan petani (kelompok, koperasi, assosiasi) yang dinamis dan terbuka pada inovasi baru.
3. Di kawasan agropolitan telah berkembang pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat tani kecil yang memiliki lahan sempit, petani penggarap, buruh tani, dan masyarakat miskin lain, yang tidak saja kegiatan budidaya pertanian (*on farm*) tetapi juga berkembang kegiatan off farm-nya; yaitu mulai pengadaan sarana dan prasarana pertanian (seperti pupuk, obat obatan, alat dan mesin pertanian), kegiatan pengolahan hasil pertanian (seperti membuat keripik, makanan kecil, dll) sampai dengan kegiatan pemasaran hasil pertanian (seperti bakulan, warung, jual beli hasil pertanian, dll) dan juga kegiatan penunjangnya (seperti lembaga jasa keuangan milik petani).
4. Memiliki sarana dan prasarana umurn yang memadai, seperti transportasi, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih dan lain lain
5. Memiliki sarana prasarana kesejahteraan sosial masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, kesenian, rekreasi, perpustakaan, swalayan

dan lain lain

6. Dapat menjamin kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, kelestarian sosial budaya dan keharmonisan hubungan kota dan desa.

Perbedaan utama antara pendekatan pembangunan agropolitan dan strategi pusat pertumbuhan yaitu bahwa agropolitan bertujuan untuk membendung urbanisasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan, sedangkan strategi pusat pertumbuhan merupakan strategi nasional pembangunan perkotaan, yang bertujuan menciptakan hierarki permukiman perkotaan secara nasional.

Pengembangan kawasan pedesaan, pembangunan agropolitan dan strategi pembangunan secara nasional diharapkan agar dilaksanakan secara berkelanjutan, karena semuanya bersifat komplementer, saling menunjang. Pembangunan kawasan agropolitan bertujuan membendung arus urbanisasi penduduk pedesaan ke daerah perkotaan, yang berarti menjembatani pembangunan pedesaan dan pembangunan perkotaan (Rusastra *et al.*, 2011).

Di Indonesia penerapan konsep pengembangan komoditas unggulan dalam pembangunan pertanian difasilitasi dalam program pengembangan kawasan agropolitan. Dalam pengembangan kawasan agropolitan diupayakan terdapat satu komoditas unggulan utama yang dikembangkan melalui diverifikasi usaha, baik diverifikasi usaha tani

maupun dalam proses industrinya agar produk yang dihasilkan mempunyai kualitas daya saing yang tinggi (Suwandi, 2005).

D. Kebijakan Pengembangan Agropolitan di Kabupaten Soppeng

Pengembangan kawasan agropolitan merupakan salah satu gerakan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan dalam rangka mempercepat pembangunan pertanian. Untuk terlaksananya Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan, maka perlu dibentuk Koordinator Lapangan (KORLAP) pada masing-masing kecamatan dalam kawasan agropolitan, yaitu: Kecamatan Lalabata, Lilirilau, Liliriaja, dan Marioriwawo, dan daerah pusat pertumbuhan (DPP) Lajoa sebagai ibukota Kelurahan Jennae Kecamatan Liliriaja.

Selanjutnya dibentuk kelompok kerja (POKJA) dan pos simpul Koordinasi (POSKO), sebagai sekretariat kelompok kerja pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Soppeng. Kemudian menetapkan personil POKJA, personil POSKO dan sekretariat pengembangan kawasan agropolitan kabupaten soppeng.

Tugas dan fungsi POKJA, antara lain: (a) merumuskan program, kebijakan operasional koordinasi perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan agropolitan, (b) mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam mempersiapkan master plan. Program dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan agropolitan, (c) menumbuhkembangkan kelembagaan, saran dan prasarana pendukung program pengembangan kawasan agropolitan, (d) mengkoordinasikan

rencana program dan kebijakan pengembangan kawasan agropolita, (e) membantu memecahkan masalah yang dialami dalam melaksanakan program kawasan agropolitan, (f) memberikan pelayanan informasi (pasar, teknologi, agroinput, p[ermodalan dan jasa) yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan.

Tugas dan fungsi POSKO, antara lain: (a) menyiapkan dan melaksanakan pengolahan data dan informasi, (b) membantu menyiapkan pedoman/petunjuk dan bahan-bahan informasi, (c) membantu POKJA dalam melaksanakan koordinasi sinkronisasi baik perencanaan, sosialisasi, pelatihan, pelaksanaan maupun pengawasan, (d) menyampaikan informasi kepada instansi yang berkepentingan untuk ditindak lanjuti, (e) membuat laporan berkala, dan (f) lain-lain tugas yang diberikan oleh POKJA.

Masing-masing KORLAP menetapkan POSKO di lokasi yang dianggap strategis (Desa/Kelurahan *Hiterland*), yaitu: satu kelurahan yang merupakan pusat pertumbuhan (DPP) yaitu kelurahan Jennae Kecamatan Liliriaja dan lima desa/kelurahan sebagai daerah penyangga, yaitu Kelurahan Labessi Kecamatan Marioriwawo, Kelurahan Galung Kecamatan Liliriaja, Desa Jampu Kecamatan Liliriaja, Desa Maccille Kecamatan Lalabata dan kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau. Biaya yang timbul dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada instansi terkait melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng dan sumber pendanaan lainnya.

E. Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah

Pengembangan prasarana dan sarana kawasan agropolitan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan guna merangsang dan mendorong petani memperbesar skala usaha dan komoditas unggulan, seperti:

1. Perbaikan sarana jalan dari dan menuju pusat agropolitan dan kawasan sentra produksi.
2. Pembukaan jalur lalu lintas (trayek) kendaraan umum dari pusat agropolitan ke kawasan sentra produksi.
3. Pembangunan pasar di kawasan pusat agropolitan
4. Pembangunan gudang penampungan hasil pada pusat agropolitan.
5. Untuk mengatasi rantai perdagangan yang terlalu panjang maka perlu dibangun hirarki pasar mulai dari pasar di tingkat kota-kota kecil, menengah yang terkait juga dengan pasar kota-kota besar dengan demikian transaksi produk-produk pertanian tidak akan dikuasai oleh tengkulak, tapi bisa langsung dilakukan transaksi di pasar.

Dalam dokumen Pengelolaan Ruang Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional dan Daerah (agropolitan) infrastruktur penunjang diarahkan untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan menyeluruh pada kawasan sentra produksi pangan (agropolitan), yang meliputi:

1. Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang subsistem agribisnis hulu (*up stream agribusiness*) untuk menunjang kelancaran

aliran barang masuk dari kota ke kawasan sentra produksi pangan dan sebaliknya, seperti : bibit, benih, mesin dan peralatan pertanian, pupuk, pestisida, obat/vaksin ternak dll. Jenis dukungan sarana dan prasarana dapat berupa:

- a. Jalan penghubung antar desa-kota
- b. Gudang penyimpanan Saprotan (sarana produksi pertanian)
- c. Tempat bongkar muat Saprotan

2. Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang subsistem usaha tani/pertanian primer (*on-farm agribusiness*) untuk peningkatan produksi usaha budi-daya pertanian: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Jenis dukungan sarana dan prasarana dapat berupa:

- a. Jalan usaha tani (*farm road*) dari desa pusat ke desa hinterland maupun antar desa hinterland yang menjadi pemasok hasil pertanian.
- b. Penyediaan sarana air baku melalui pembuatan sarana irigasi untuk mengairi dan menyirami lahan pertanian.
- c. Dermaga, tempat pendaratan kapal penangkap ikan, dan tambatan perahu pada kawasan budi daya perikanan tangkapan, baik di danau ataupun di laut.
- d. Sub terminal pengumpul pada desa-desa yang menjadi *hinterland*

3. Dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung subsistem agribisnis hilir (*down stream agribusiness*) berupa industri-industri pengolahan hasil pertanian sebelum dipasarkan sehingga mendapat nilai tambah. Jenis dukungan sarana dan prasarana dapat berupa:
 - a. Sarana pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan.
 - b. Gudang penyimpanan hasil pertanian, termasuk didalamnya sarana pengawetan/pendinginan (*cold storage*).
 - c. Sarana pengolahan hasil pertanian seperti: tempat penggilingan, tempat pengemasan, rumah potong hewan, tempat pencucian dan sortir hasil pertanian, sarana industri-industri rumah tangga termasuk *food service*, seperti: pembuatan kripik, dodol, jus, bubuk/tepung, produk segar *supermarket*, *aero catering*, dan lain-lain.
 - d. Sarana pemasaran dan perdagangan hasil pertanian seperti: pasar tradisional, kios cendramata, pasar hewan, tempat pelelangan ikan, dan terminal agribisnis.
 - e. Terminal, pelataran, tempat parkir serta bongkar muat barang, termasuk sub terminal agribisnis (STA).
 - f. Sarana promosi dan pusat informasi pengembangan agribisnis

- g. Sarana kelembagaan dan perekonomian seperti bangunan koperasi usaha bersama (KUB), perbankan, balai pendidikan dan pelatihan agribisnis.
- h. Jalan antar desa-kota, jalan antar desa, jalan poros desa dan jalan lingkar desa yang menghubungkan beberapa desa *hinterland*.
- i. Sarana penunjang seperti: pembangkit listrik/generator listrik, telepon, sarana air bersih untuk pembersihan dan pengolahan hasil pertanian, sarana pembuangan limbah industri dan sampah hasil olahan.

F. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur (Transportasi) Kabupaten Soppeng

Transportasi merupakan hal pokok bagi aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dapat berpengaruh terhadap lokasi permukiman, penyediaan barang dan jasa, kebutuhan konsumsi, serta kualitas hidup. Sistem transportasi yang ada di Kabupaten Soppeng belum menunjukkan adanya pengelolaan yang maksimal, dimana dipengaruhi terbatasnya sarana dan prasarana transportasi, sehingga perlu adanya perencanaan pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang dapat mendukung kelancaran pola interaksi antar maupun inter wilayah.

Transportasi mempunyai peranan penting dalam mempercepat pertumbuhan wilayah dan mempengaruhi kondisi perekonomian wilayah. Kabupaten Soppeng mempunyai wilayah terbagi dalam 3 (tiga) dimensi,

yakni; pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Untuk itu diperlukan strategi sistem transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas antara pusat-pusat pertumbuhan wilayah.

Pengembangan sistem transportasi darat dimaksud untuk memudahkan interaksi antar dan inter wilayah Kabupaten Soppeng. Adapun strategi yang dapat dilakukan adalah;

- a. Pelebaran jalan arteri yang merupakan jalan negara (poros regional) yang memanjang dari arah Selatan ke Utara, minimal 3 lajur diluar kawasan perkotaan dan 4 lajur didalam kawasan perkotaan.
- b. Membangun dan merintis jaringan jalan kolektor primer dari arah Kota Soppeng menuju ke arah Barat tembus ke jalur Barat (jalan negara) melalui Kabupaten Barru.
- c. Meningkatkan poros jalan kolektor primer dari Lajoa menuju Citta ke Kecamatan Amali Kabupaten Bone, dimaksudkan sebagai jalur alternatif.
- d. Terminal yang dibutuhkan Kabupaten Soppeng adalah terminal lokal, tipe C yang melayani armada angkutan lokal dan pedesaan.

1. Tujuan dan sasaran pengembangan sistem transportasi adalah:

Fungsi utama sistem prasarana transportasi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan manusia dan barang dari suatu tempat ketempat lain. Sistem transportasi berfungsi untuk menjembatani keterkaitan fungsional

antar kegiatan sosio-ekonomi di Kabupaten Soppeng. Sesuai dengan fungsi tersebut, maka kebijakan pengembangan sistem transportasi diarahkan untuk menunjang pengembangan wilayah di Kabupaten Soppeng, tujuan pengembangan sistem transportasi adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan sistem transportasi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah Kabupaten Soppeng agar dapat berkembang dengan serasi bersama-sama dengan wilayah yang ada di sekitarnya dimana sasarannya adalah:
 - Membuka daerah-daerah yang terisolasi dalam wilayah Kabupaten Soppeng.
 - Meningkatkan interaksi antar dan inter wilayah Kabupaten Soppeng.
 - Menunjang perkembangan sektor-sektor kegiatan utama di Kabupaten Soppeng
- b. Pengembangan sistem transportasi yang bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan, yaitu dengan sasaran:
 - Memperlancar koleksi dan distribusi arus barang dan jasa serta meningkatkan mobilitas penduduk di Kabupaten Soppeng.
 - Meningkatkan keterhubungan ke wilayah-wilayah potensi yang masih terisolasi.

- c. Pengembangan sistem transportasi yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pariwisata, yaitu dengan sasaran: meningkatkan hubungan kawasan pariwisata dengan dunia luar (asing maupun domestik).
- d. Mempertinggi aksesibilitas dan mobilitas pergerakan penumpang dan barang.

2. Pola Pergerakan

Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam menghubungkan satu wilayah pusat pertumbuhan tertentu dengan wilayah pusat pertumbuhan lain. Transportasi mempunyai peran penting dalam menghubungkan tempat-tempat atau kawasan. Hubungan fungsional dapat dikelompokkan ke dalam kategori: (a) hubungan eksternal, (b) hubungan antar pusat, dan (c) hubungan pusat dan wilayah belakangnya (*hinterland*).

a. Hubungan Eksternal

Hubungan eksternal dicirikan dengan pola pergerakan yang didefinisikan sebagai pergerakan yang berasal dari luar wilayah perencanaan atau pergerakan yang menuju ke luar wilayah perencanaan. Pergerakan eksternal memperlihatkan peran Kabupaten Soppeng dalam kontelasi regional yang terlihat dari tingkat interaksi antar luar wilayah dengan wilayah Kabupaten Soppeng. Untuk mengantisipasi perkembangan hubungan

eksternal, maka jaringan jalan yang menghubungkan dengan wilayah sekitarnya harus ditingkatkan.

b. Hubungan Antar Pusat (*Antar Ibukota Kecamatan*)

Hubungan antar pusat (kota-kota kecamatan) di wilayah Kabupaten Soppeng umumnya memiliki hubungan fungsional yang relatif kuat dengan Kota Watansoppeng yang merupakan pusat pertumbuhan dan pusat pengembangan perekonomian di wilayah Kabupaten Soppeng secara keseluruhan. Hubungan fungsional antar kota (kota kecamatan) di wilayah Kabupaten Soppeng masih relatif kecil, kecuali pada kota-kota yang sudah tersentuh dengan jaringan transportasi. Hubungan fungsional yang relatif kecil disebabkan oleh tingkat perkembangan kota yang masih lambat dan keberadaan sarana dan prasarana transportasi belum memadai serta kendala fisik wilayah Kabupaten Soppeng.

c. Hubungan antara pusat dan wilayah belakangnya.

Hubungan fungsional antar pusat (kota) dan wilayah belakangnya di Kabupaten Soppeng terutama berkaitan erat dengan fungsi dan peran kota sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, pusat perdagangan, pusat koleksi dan distribusi, dan pusat jasa pelayanan untuk wilayah pengaruh kota bersangkutan (*hinterland*). Hubungan antar kota dan wilayah belakangnya di wilayah Kabupaten Soppeng masih relatif rendah. Hal ini disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, selain itu pola

sebaran desa-desa yang menyebar dan jarak antar kota serta topografi wilayah Kabupaten Soppeng yang berbukit-bukit yang merupakan salah satu faktor kendala untuk pembangunan jaringan transportasi.

Berdasarkan pola pergerakan yang terjadi di wilayah Kabupaten Soppeng, maka konsep pengembangan sistem transportasi di wilayah Kabupaten Soppeng harus didasarkan pada konsep integrasi sistem transportasi intermoda khususnya moda angkutan darat, dimana pergerakan eksternal (dalam kaitannya dengan hubungan eksternal) menggunakan sistem transportasi darat. Sedangkan untuk pergerakan internal (dalam kaitannya dengan hubungan antar pusat dan antara pusat dengan wilayah belakangnya), agar tercapai efisiensi dan murah, maka terutama dikembangkan sistem transportasi darat.

G. Konsep Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Sejalan dengan pengembangan kawasan agropolitan melalui konsep pendekatan wilayah maka konsep pendekatan pemberdayaan sumber daya manusia/masyarakat juga harus seiring dan sejalan. Pemberdayaan sumberdaya manusia merupakan hal yang sangat penting karena tanpa didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas maka pengembangan kawasan agropolitan dengan pendekatan wilayah akan kurang bisa mencapai hasil yang optimal. Pengembangan sumberdaya manusia dapat terlaksana dan sesuai dengan harapan, jika setiap komponen dan fungsi organisasi baik dipusat maupun didaerah

memandang upaya pengembangan sumberdaya manusia bukan sebagai unsur penunjang, melainkan merupakan bagian integral dari masing-masing fungsi organisasi (*integrative linkages*).

Sumberdaya manusia pertanian menyangkut sekitar 39,5 juta tenaga kerja pertanian terdiri dari petani, petugas serta jutaan stakeholders pembangunan pertanian dengan segenap kompleksitas permasalahan pada setiap segmen sumberdaya manusia pertanian. Masalah utama sumberdaya manusia pertanian, yaitu: tingkat pendidikan rendah, produktivitas rendah dan sebaran yang tidak merata. Untuk itu diperlukan acuan yang menjadi kebijakan makro pengembangan sumberdaya manusia pertanian baik dipusat maupun di daerah, salah satunya melalui program pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan sumberdaya manusia.

Pemberdayaan adalah pemberian kesempatan untuk secara bebas memilih berbagai alternatif dan mengambil keputusan sesuai dengan tingkat kesadaran, kemampuan dan keinginan mereka serta memberi kesempatan kepada mereka belajar dari keberhasilan serta kegagalan dalam merespon terhadap perubahan sehingga mampu mengendalikan masa depannya. Pemberdayaan memiliki ciri-ciri sebagai upaya; 1) meningkatkan kepuasan kerja, 2) memperluas pengetahuan dan keterampilan meningkatkan kualitas kerja, 3) memberikan kebebasan berkreasi serta mengembangkan hal-hal baru, 4) pengawasan dilakukan melalui keputusan bersama, 5) pemberian tugas lengkap tanpa parsial,

6) berorientasi pada kepuasan orang yang dilayani dan 7) memenuhi kebutuhan pasar.

Mengacu pada konsep-konsep tersebut, pemberdayaan masyarakat atau sumberdaya manusia kearah kemandirian dalam berusahatani merupakan kondisi yang dapat ditumbuhkan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dalam bentuk perubahan perilaku, yakni meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat menentukan sendiri pilihannya dan memberikan respon yang tepat terhadap berbagai perubahan sehingga mampu mengendalikan masa depannya dan dorongan untuk lebih mandiri. Pemberdayaan ini penting karena sumberdaya manusia berperan sebagai pelaku utama dalam keberhasilan pengembangan kawasan agropolitan.

H. Potensi Pertanian dalam Pengembangan Wilayah

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor di bidang ekonomi yang memiliki arti dan kedudukan penting dalam pembangunan nasional. Sektor ini berperan sebagai sumber penghasil bahan makan, sumber bahan baku bagi industri, mata pencaharian sebagian besar penduduk, penghasil devisa negara dari ekspor komoditinya bahkan berpengaruh besar terhadap stabilitas dan keamanan nasional. Namun keberadaan sumberdaya lahan yang terbatas tidak mampu mengimbangi kebutuhan lahan yang sangat pesat baik dari sektor pertanian maupun non pertanian, akibatnya timbul persaingan penggunaan lahan yang saling tumpang tindih dan tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Hal ini dapat menjadi kendala bagi proses pembangunan nasional, khususnya di sektor pertanian. Perencanaan yang tepat dan informasi yang aktual sangat dibutuhkan oleh para pengguna lahan dan pihak-pihak yang terkait agar penggunaan lahan tersebut dapat optimal sesuai dengan kemampuannya dan dapat digunakan secara berkelanjutan (Soekartawi, 1996).

Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, diantaranya dengan membuat suatu perencanaan yang tepat dan rasional baik melalui aspek teknis maupun non teknis. Aspek teknis dapat dilakukan diantaranya dengan menentukan potensi wilayah sedangkan aspek non teknis dapat dilakukan dengan pendekatan kebijaksanaan bagi pengembangan wilayah tersebut. Kedua aspek ini akan saling berkaitan erat terhadap keberhasilan proses dan hasil pembangunan suatu wilayah. Aspek teknis merupakan salah satu cara yang tepat dan mendasar bagi perencanaan pembangunan wilayah karena dengan cara ini dapat diketahui potensi dan daya dukung lahan di wilayah tersebut untuk jenis-jenis penggunaan lahan yang dipertimbangkan.

Penilaian potensi wilayah merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencari lahan yang memang berpotensi bagi pembangunan pertanian. Dengan dilakukannya penilaian potensi wilayah ini diharapkan akan dihasilkan suatu perencanaan pembangunan pertanian yang tepat dan rasional, dimana pemanfaatan lahannya dapat

optimum, lestari dan berkelanjutan. Penilaian potensi wilayah dilakukan melalui analisis potensi wilayah baik secara fisik maupun sosial ekonomi. Dengan pendekatan tersebut diharapkan dihasilkan potensi wilayah berupa komoditas unggulan yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif (Mubyarto, 1989).

Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan data-data sekunder yang telah ada dan masih representatif bagi wilayah tersebut yang diolah melalui analisis wilayah dan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Geografis. Rangkaian proses penilaian potensi wilayah di atas serta hasil akhirnya diharapkan dapat lebih mudah dimengerti dan dipahami, serta dapat memberikan informasi yang cepat, aktual dan rasional, sehingga dapat mendukung dalam perencanaan suatu wilayah khususnya bagi perencanaan pembangunan pertanian ataupun komoditas-komoditas unggulan di Kabupaten Soppeng

Sebagai sektor dominan di wilayah berbasis sumberdaya alam, pertanian memiliki peran sebagai penghasil pangan, bahan mentah dan bahan baku industri, penyedia lapangan kerja dan lapangan usaha, sumber devisa serta pelestarian dan fungsi lingkungan. Peran tersebut menunjukkan pentingnya pembangunan yang dapat diartikan sebagai perubahan dari sistem tradisional ke modern. Hayami dan Kikuchi (dalam Kasryno, dkk., 1984) menyatakan bahwa aktivitas pertanian di kawasan perdesaan sulit untuk dipisahkan dari kegiatan ekonomi keseluruhan karena kegiatan yang telah berlangsung turun

temurun tersebut telah menjadi budaya. Oleh karena itu, pembangunan pertanian bukan hanya berupaya agar terjadi transformasi system produksi semata, tetapi juga transformasi sosial.

I. Kerangka Konseptual

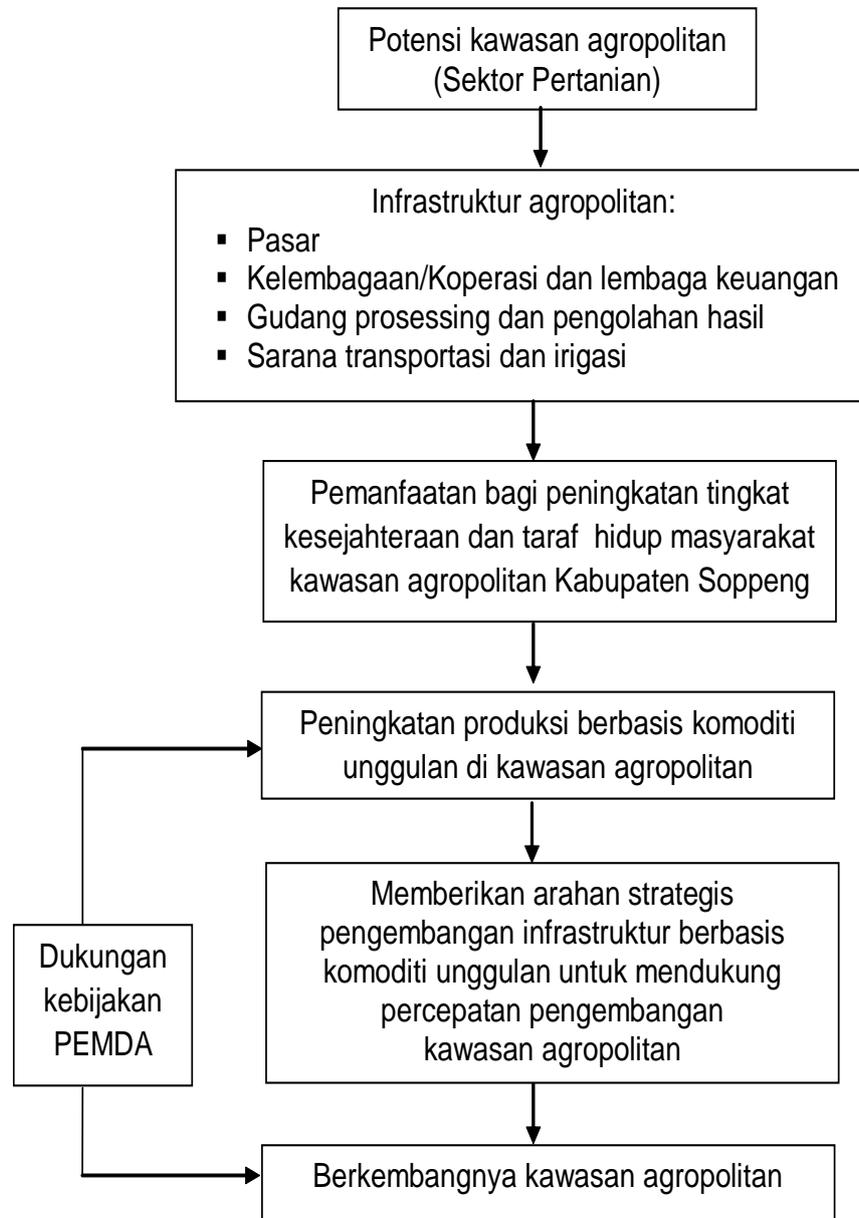
Kabupaten Soppeng adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah meneriam program agropolitan . Berdasarkan SK Bupati No. 691/VIII/2003 telah ditetapkan kawasan agropolitan meliputi empat wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Marioriwawo, Liliriaja, Lilirilau dan Lalabata. Di mana Kecamatan Liliriaja sebagai daerah pusat pertumbuhan (DPP) tepatnya di Lajoa yang merupakan ibukota Kelurahan Jennae. Sedangkan yang termasuk daerah penyangga terdiri dari lima desa/kelurahan diantaranya Kelurahan Labessi Kecamatan Marioriwawo, Kelurahan Galung Kecamatan Liliriaja, Kelurahan Jampu Kecamatan Liliriaja, Desa Maccile Kecamatan Lalabata dan Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau.

Keterbatasan berbagai infrastruktur (prasarana dan sarana wilayah) telah menyebabkan lambatnya perkembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Soppeng yang berimplikasi terhadap taraf hidup masyarakat.

Pengembangan infrastruktur dalam menunjang kawasan agropolitan dapat dilakukan dengan dukungan dari pihak pemerintah dan masyarakat, akan tetapi dibutuhkan sebuah analisis kebutuhan yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pemangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan nyata masyarakat dan stakeholders lain agar percepatan

pengembangan terhadap sektor prioritas dapat terwujud. Analisis yang akan digunakan adalah analisis SWOT untuk memberikan arahan strategis pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Soppeng.

Diharapkan dengan terpenuhinya infrastruktur wilayah ini akan membawa implikasi terhadap pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Soppeng di masa yang akan datang, sehingga akan terwujud peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Soppeng. Untuk memahami lebih jelasnya mengenai alir pikir dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Kerangka konseptual